

e-news letter

JAN IV 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Saadiah Uluputty, S.T

HENTIKAN!

Rencana Pencabutan
Subsidi Elpiji 3 Kg,
Bebani Wong
Cilik



Apa yang terjadi di awal Pemerintahan ini seperti bertolak belakang dengan konsep *fastabiqul khairat*, nampak lebih banyak berlomba-lomba melakukan kenaikan

Disaat Berlomba-lomba dalam Kenaikan

FASTABIQUL khairat adalah sebuah ajakan yang artinya berlomba-lomalah berbuat kebajikan. Pemerintah yang dihasilkan dari proses pemilu pada prinsipnya diharapkan menjadi agen kebaikan, yang secara teknis seluruh "janji kebaikan" saat masa kampanye mampu diimplementasi oleh simpul-simpul otoritas. Lazimnya bernama birokrasi seperti Kementerian dan Lembaga.

Apa yang terjadi di awal Pemerintahan ini seperti bertolak belakang dengan konsep *fastabiqul khairat*, nampak lebih banyak berlomba-lomba melakukan kenaikan. Mari kita runut secara tekun. Per 1 Januari 2020 iuran BPJS Kesehatan telah naik, tidak tanggung dua kali lipat. Tidak mau ketinggalan LPG 3 Kg direncanakan naik dari 16.000 /tabung menjadi 35.000/tabung. Melesat

kemudian tarif Tol, sepanjang tahun 2020 dijadwalkan ada 39 ruas tol yang tarifnya akan naik. Lalu jika tak ada aral melintang bulan maret Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA naik.

Saat bertemu dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019) Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya saat ini (periode ke dua) tidak lagi memiliki beban dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Kala itu Jokowi bertekad bekerja sebaik-baiknya, khususnya demi kemajuan di bidang ekonomi. Apapun, asalkan demi perbaikan situasi perekonomian negara, akan dilakukannya. Lalu mengapa semua naik? apakah kesejahteraan dan kemajuan terwujud dengan kenaikan? Terkadang apakah ini yang dimaksud tidak ada beban? Entahlah.

Belum surut beragam kenaikan, disaat bersamaan Pemerintah menggulirkan Omnibus Law yang sejak awal nampak tidak matang. Terburu-buru, seperti dikejar target. Hingga pada akhirnya dikalangan pekerja Rancangan Undang Undang (RUU) cipta

Kenaikan harga tahun 2020 siap-siap rogoh kocekmu dalam-dalam



lapangan kerja disingkat menjadi CILAKA, karena mereduksi berbagai macam hak termasuk yang paling dasar sekalipun; cuti haid dan melahirkan. Padahal Tax Amnesty jadi pelajaran berharga bagi Pemerintah, pada akhirnya tidak banyak berdampak dalam mengurangi kesenjangan tax ratio.

Tata kelola pemerintahan berjalan ditepi, jikapun menelisik di tengah kehidupan masyarakat datang untuk menagih dan "merampas".

Beragam kenaikan digedor langsung ke jantung rumah tangga, tanya saja bagaimana BPJS Kesehatan mengingatkan iuran mulai dari ketokan pintu hingga pesan berbayar. Kadang kita berpikir mereka berkerja untuk siapa, seperti orang lain yang tidak pernah bersama.

Tata kelola dan tata krama memerintah nampak kian memudar, ditelan egoisme sektoral dan parsial. Kementerian dan Lembaga berlomba menaikkan berbagai kebijakan, seraya mengabaikan

seluruh masukan. Termasuk kritik dan saran dari DPR, perwakilan resmi rakyat yang mandatnya asli dan otentik. Tidak kaleng-kaleng. Ironisnya laku lampah itu dianggap benar oleh pemberi kuasa.

Atas apa yang terjadi sejak awal kami mohon izin di Gatot Subroto mengambil jarak tegas, akan tetap bersuara dan mengingatkan rekan-rekan di medan merdeka. *That you are on the wrong track.*

Humas FPKS DPR RI

Presiden Jangan Bebani Rakyat dengan Naiknya Harga Gas 3 Kg



Antara Pemerintah dan DPR sudah sepakat menganggarkan subsidi gas melon 3 kg. Angka-angka itu sudah disepakati dan disahkan melalui sidang Paripurna DPR. Jadi Pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya. Karena itu berpotensi melanggar Undang-undang.



Mulyanto

Anggota Komisi VII DPR

"Mereka wong cilik seharusnya diberi perhatian. Negara harus hadir. Iuran BPJS baru saja naik. Jangan beri beban yang kian memberatkan ekonomi rakyat kecil dengan mencabut subsidi elpiji 3 kg



Saadiah Uluputty

Anggota Komisi VII DPR



Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau

Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS DPR

kenaikan harga bukan hanya mendorong inflasi tetapi juga menekan kesejahteraan masyarakat dan bisa menaikkan angka kemiskinan. Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 9,22 persen pada September 2019.



Ecky Awal Mucharam

Anggota Komisi XI DPR

Pemerintah harusnya lebih peka dengan kemampuan masyarakat kelas bawah saat ini dengan memperhatikan efek domino yang muncul dari dihapuskannya subsidi elpiji 3 kg



Nasir Djamil

Anggota Fraksi PKS DPR

Ketua Fraksi PKS DPR :

Presiden Jangan Bebani Rakyat dengan Naiknya Harga Gas 3 Kg

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, M.A

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (20/01) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-gas.

Setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, lalu menaikkan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar. Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan

lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkirinya bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat

miskin. Mereka perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.

“Ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” kata Jazuli.

Kita mahfum Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana kita kategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan. Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha



kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dll.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Presiden menimbang betul pelepasan harga gas 3kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan

pertengahan tahun 2020.

Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masyarakat kita yang tidak mampu.

Fraksi PKS terdepan Tolak Penghapusan Sertifikasi Halal dalam RUU Omnibus Law

Mungkin saja ini bagian dari agenda liberalisasi produk perdagangan dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen Indonesia. Itu yang tegas kita tolak. Karena perlindungan dan JPH itu kewajiban negara dan pemerintah

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (21/01) - Beredar draf RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang berisi penghapusan kewajiban sertifikasi halal dalam UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini ketika ditanya oleh sejumlah wartawan tentang hal itu menyatakan dengan tegas Fraksinya akan menjadi yang terdepan menolak usul itu jika benar termaktub dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan pemerintah.

"Saya cek ke Anggota Baleg, Pemerintah belum mengirim draf resmi Omnibus

Law Cipta Lapangan Kerja. Tapi jika benar ada pasal penghapusan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana mandat UU JPH, Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan menolaknya," tegas Jazuli.

Menurut Jazuli adalah salah kaprah dan langkah sembrono jika ada niatan menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen/masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, apalagi jika itu dianggap menghambat investasi atau ekonomi.

"Berarti mereka tidak mengerti filosofi dan semangat

pemberian jaminan produk halal yang undang-undangnya telah kita sahkan bersama sebagai konsensus yang disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

UU JPH, kata Jazuli, merupakan manifestasi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, perlindungan konsumen, dan upaya negara menghadirkan produk yang terjamin kehalalan, kesehatan dan kebaikannya bagi masyarakat.

"Maka, kalau nanti benar diusulkan untuk dihapus, ini namanya kemunduran atau set back. Atau mungkin saja ini bagian dari agenda liberalisasi produk perdagangan dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen Indonesia. Itu yang tegas kita tolak. Karena perlindungan dan JPH itu kewajiban negara dan pemerintah," pungkas Jazuli.

Sebelumnya diberitakan, RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus, yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

Pasal 4

Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dengan dihapusnya Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal, pasal yang menjadi turunan Pasal 4 juga dihapus. Yaitu:

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal

diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Penculikan 5 WNI Bukti Belum Maksimal Patroli Bersama Malaysia

*Kalau perjanjian ini kan perjanjian militer,
mestinya TNI melakukan kontak dengan mitra di
Malaysia dengan mendorong supaya
komitmennya dipenuhi,"*

H. Sukamta, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

Penculikan 5 WNI Bukti Belum Maksimal Patroli Bersama Malaysia

Kalau perjanjian ini kan perjanjian militer, mestinya TNI melakukan kontak dengan mitra di Malaysia dengan mendorong supaya komitmennya dipenuhi

H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut, salah satu indikasi terjadinya penculikan 5 WNI di Perairan Tambisan, Tungku Lahad Datu, N Sabah karena pihak tentara Malaysia belum mengimplementasikan kesepakatan patroli bersama. "Di wilayah yang rawan itu, memang kita punya kesepakatan antara (tentara) Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk patroli bersama. Ternyata, ada indikasi tentara Malaysia ini belum melakukan patroli yang memadai di situ," ujar Sukamta di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sukamta mengatakan, penculikan tersebut berada di wilayah yang menjadi teritorial patroli tentara Malaysia.

Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak konsisten dalam

mengimplementasikan kesepakatan bersama.

"Saya kira ini perlu penanganan yang komprehensif. Upaya kita membuat semua pihak yang sudah berjanji itu untuk konsisten melaksanakan perjanjian," ucap dia.

Dia juga mengatakan, perjanjian itu merupakan perjanjian militer sehingga TNI perlu membangun komunikasi dengan tentara Malaysia supaya komitmen awal dipenuhi.

"Kalau perjanjian ini kan perjanjian militer, mestinya TNI melakukan kontak dengan mitra di Malaysia dengan mendorong supaya komitmennya dipenuhi," ucap dia.

Penculikan WNI yang bekerja di Negeri Sabah, Malaysia di Perairan Tambisan,

Tungku Lahad Datu, N Sabah, Malaysia kembali terjadi.

Dari delapan kru kapal yang semuanya WNI, lima orang di antaranya diculik. Sementara itu, tiga di antaranya dibebaskan bersama kapal mereka.

Berdasarkan informasi tertulis dari Kepolisian Tambisan, Sabtu (18/1/2019), lokasi penculikan tidak jauh dari lokasi hilangnya Muhammad Farhan (27) dan kawan-kawan pada 23 September 2020, tepatnya di Perairan Tambisan Tungku Lahad Datu.

Kali ini, kejadiannya berlangsung pada Kamis (16/1/2019) pukul 20.00 waktu setempat.

Saat itu, kedelapan WNI ini menangkap ikan menggunakan kapal kayu dengan izin terdaftar nomor SSK 00543/F.

Penculikan WNI yang menggunakan kapal atas nama majikan mereka di Sandakan ini diterima laporannya oleh aparat Kepolisian Maritim Lahad Datu pada Jumat (17/1/2019) sekitar pukul 13.17 waktu setempat.

Setelah mendapatkan laporan itu, aparat kepolisian negara itu bergerak melakukan pencarian hingga akhirnya



melihat kapal bergerak dari arah Filipina memasuki Perairan Malaysia.

Keberadaan kapal yang digunakan WNI tersebut terpantau radar Pos ATM Tambisan pada Jumat sekitar pukul 21.10 waktu setempat.

Aparat Kepolisian Maritim Lahad Datu menahan kapal tersebut sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan tiga kru semuanya WNI.

Ketiga WNI yang

ditemukan bersama kapalnya adalah Abdul Latif (37), Daeng Akbal (20), dan Piau bin Janiru (36).

Sementara itu, lima rekannya, yakni Arsyad bin Dahlan (42) selaku juragan, Arizal Kastamiran (29), La Baa (32), Riswanto bin Hayono (27), dan Edi bin Lawalojo (53) dipastikan disandera

Foto : dpr.go.id

Wakil Ketua Komisi I Prihatin, atas terbaliknya Kapal Wartawan Istana di Labuan Bajo

Saya minta instansi terkait agar bisa melakukan evaluasi menyeluruh karena kapal sejenis ini yang kemarin digunakan Presiden Jokowi dan biasa di gunakan wisatawan sehingga jangan sampai terulang kejadian yang sama di kemudian hari” ujar

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (21/01) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan kecelakaan kapal wartawan Istana Presiden yang terbalik di Labuan Bajo akibat diterpa badai.

Kapal rombongan wartawan yang ikut Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Labuan Bajo terbalik pada Selasa, 21/01/2020.

“Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan media, saya sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan duka mendalam atas musibah yang dialami rekan-rekan

wartawan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa namun alat-alat peliputan sebagian sepertinya tidak bisa diselamatkan semoga ada solusi terkait musibah tersebut” kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar segera dilakukan upaya evakuasi dan penyelamatan dari segenap pihak, serta evaluasi menyeluruh terkait kelayakan kapal phinisi yang digunakan.

“Saya minta instansi terkait agar bisa melakukan

evaluasi menyeluruh karena kapal sejenis ini yang kemarin digunakan Presiden Jokowi dan biasa di gunakan wisatawan sehingga jangan sampai terulang kejadian yang sama di kemudian hari” ujar Kharis.

Kharis mengingatkan pentingnya upaya serius untuk mencegah kecelakaan seperti ini tidak terulang karena Presiden Jokowi menetapkan Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium yang perlu kepastian keselamatan dan keamanan wisatawan.

“Perusahaan moda transportasi air harus mematuhi peraturan keselamatan dalam perjalanan dan memperhatikan standard operating procedure (SOP) guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang khususnya wisatawan,” tutup Kharis.



Toriq Hidayat Sesalkan Pemecatan terhadap Dirut TVRI

Empat orang Dewan Pengawas setuju pemecatan Dirut TVRI, namun ada 1 orang Dewan Pengawas yang tidak setuju. Oleh karena itu perlu dilakukannya audit investigasi terutama tentang dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Dirut TVRI

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (22/01) --- Anggota DPR RI Toriq Hidayat menyatakan menyesal dengan polemik pemecatan terhadap Dirut TVRI.

Menurut Toriq, seharusnya kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak.

"permasalahan yang timbul dalam pemecatan ini salah satu dan yang paling utama adalah permasalahan komunikasi", ujar Toriq usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas TVRI Selasa, (21/01/2020)

Setiap permasalahan yang terjadi, kata Toriq, selalu dikomunikasikan melalui surat tanpa pertemuan antara kedua belah pihak. Sehingga menimbulkan banyak prasangka dan terkesan subjektif.

"Empat orang Dewan Pengawas setuju pemecatan Dirut TVRI, namun ada 1 orang Dewan Pengawas yang tidak setuju. Oleh karena itu perlu dilakukannya audit investigasi terutama tentang dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Dirut TVRI",

ungkapnya.

Toriq sangat menyayangkan, pada RPD ini pihak Dewan Pengawas tidak menyertakan laporan detail yang disertai dengan bukti tentang penyimpangan penggunaan keuangan TVRI tersebut.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS ini, hingga kini belum dapat menyetujui atau tidak menyetujui pemecatan terhadap Dirut TVRI, karena masih harus melakukan pendalaman terutama masih akan mendengar penjelasan dari Dewan Direksi TVRI terlebih dahulu.

"Permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan bijaksana. Sehingga polemik tentang pemecatan ini tidak berlarut-larut dan nantinya akan merugikan TVRI sendiri", pungkas Toriq.

Sebagai penutup Toriq mengingatkan bahwa TVRI sebagai satu-satunya TV nasional harus diselamatkan dari berbagai kepentingan.



Alokasi Anggaran untuk Daerah Perbatasan Harus Optimal

Sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain. Apabila BNPP menjadi panglima, maka BNPP dapat berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang lainnya, agar wilayah perbatasan negara itu menjadi sesuatu yang baik.

TEDDY SETIADI, S.I.Kom

Anggota Komisi II DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain. Dikatakannya, apabila BNPP menjadi panglima, maka BNPP dapat berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang lainnya, agar wilayah perbatasan negara itu menjadi sesuatu yang baik.

"Apalagi Presiden mengatakan kita akan memulai dari (wilayah) pinggir. Kalau memulai dari pinggir maka otomatis alokasi anggaran dan perhatian juga harus optimal. Sehingga perbatasan-perbatasan negara yang dianggap rawan bisa dikendalikan," kata Teddy saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, BNPP, dan Rektor IPDN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Menurutny, kalau tidak ada

good will maka berat untuk mengatasi persoalan itu.

Sementara itu, berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), politisi Fraksi PKS ini sepakat bahwa seharusnya urusan pemindahan IKN bukanlah dipegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tetapi seharusnya di bawah kendali Kemendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Teddy menyampaikan hal yang terkait dengan masalah KTP elektronik. Ia menegaskan, jangan sampai masalah KTP-el yang sederhana menjadi rumit. "Mengurus izin saja sudah rumit, masa KTP juga rumit. Hal ini sederhana menurut saya, tinggal dicarikan terobosan-terobosan hukumnya," ujarnya.

Teddy juga menyatakan dirinya tidak menyambut gembira atas penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dijadikan bagian dari penyelesaian bencana. Dikatakannya, sebagai negara yang rawan bencana alam, Indonesia memang perlu mempersiapkan anggaran-anggaran untuk penanggulangan bencana. (dep/es)

Foto: dpr.go.id





FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dimiyati Minta Kasus Jiwasraya Dibuka Secara Gamblang

jika Kejaksaan bisa membongkar kasus ini secara gamblang, maka masyarakat bisa tahu siapa dalang yang merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun. Agar kita bisa tau permainan ini kemana? Kita harapkan ini dibuka selebar-lebarnya, jangan sampai ada tebang pilih

Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.
Anggota Komisi III DPR RI

Nasir Djamil: Komisi III Berkomitmen Memuluskan Kinerja KKR Aceh



Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI Komisi III Nasir Djamil menyatakan Komisionya memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di Aceh.

Hal tersebut ia sampaikan pada acara diskusi dan media briefing terkait “Penyerahan Hasil Kajian Akademik tentang Rekomendasi Kebijakan KKR Aceh” yang berlangsung di Tjikini Lima, Jakarta, Kamis (23/01/2020).

“Kami punya komitmen kuat terhadap penyelesaian HAM masa lalu termasuk memuluskan jalan KKR di Aceh. Untuk mendorong penyelesaian dan agar tidak ada dusta diantara kita, maka komisi III akan mengagendakan pertemuan tripartite antara Komisi III, Jaksa Agung dan KOMNAS HAM pada masa sidang ini” tegas Nasir.

Pada acara diskusi ini, KKR Aceh menyerahkan dokumen kajian akademik tentang rekomendasi kebijakan kepada Komisi III DPR-RI yang diterima oleh Nasir Djamil (PKS)

“Kami punya komitmen kuat terhadap penyelesaian HAM masa lalu termasuk memuluskan jalan KKR di Aceh. Untuk mendorong penyelesaian dan agar tidak ada dusta diantara kita, maka komisi III akan mengagendakan pertemuan tripartite antara Komisi III, Jaksa Agung dan KOMNAS HAM pada masa sidang ini”

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Aceh II

dan Taufik Basari (Nasdem). Selanjutnya KKR Aceh juga akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo melalui KSP.

Politisi asal Aceh ini juga menyebutkan eksistensi dan keberhasilan KKR Aceh nantinya diharapkan dapat menjadi cerminan dan contoh bagi penyelesaian pelanggaran HAM di level nasional. Sehingga dukungan untuk KKR Aceh mestilah diberikan secara penuh.

“Keberadaan dan proses penyelesaian HAM yang

dilaksanakan oleh KKR Aceh nantinya bisa jadi role model bagi penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia. Karena KKR di level nasional belum sempat dilaksanakan akibat putusan MK”, tandasnya.

Selaku ketua Forbes Aceh, Nasir Djamil berharap presiden merespon isi dari rekomendasi tersebut karena penyelesaian permasalahan HAM di Aceh merupakan masalah yang urgent untuk diselesaikan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU Helsinki.

Yasona Harus Belajar Dari Kasus Analogi Priok dan Menteng

Sebagai Anggota DPR RI yang banyak berinteraksi dengan warga priok, Adang melihat analogi yang disampaikan oleh Yasona Laoly sebagai bentuk penyamarataan kondisi dan situasi (stereotyping). Padahal sejatinya realita yang terjadi tidak seperti apa yang dipersangkakan

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (23/1) Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan komentar dan analogi, terlebih dirinya merupakan seorang pejabat publik. Adang berharap protes warga Tanjung Priok dapat menjadi pelajaran berharga bagi Yasona Laoly.

Sejumlah warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdemonstrasi di depan gedung Kemenkumham, Jalan RA Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020). Mereka merasa

tersinggung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM

Yasonna Laoly yang menyebutkan kawasan Tanjung Priok identik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

"Penggunaan analogi anak Menteng dan Tanjung Priok sesungguhnya terkait kepantasan dan etika seorang pejabat di ruang publik. Sebuah pesan tidak bisa bebas nilai dan makna seperti di ruang hampa, harus memperhatikan sejumlah kearifan lokal yang berkembang di masyarakat" disampaikan Adang Daradjatun kepada media pada hari Kamis (22/1) di Jakarta.

Sebagai Anggota DPR RI yang banyak berinteraksi dengan warga priok, Adang

melihat analogi yang disampaikan oleh Yasona Laoly sebagai bentuk penyamarataan kondisi dan situasi (stereotyping). Padahal sejatinya realita yang terjadi tidak seperti apa yang dipersangkakan.

Adang memberikan gambaran sebagai wakil rakyat yang sudah tiga periode mewakili daerah pemilihan Jakarta III, Tanjung Priok ada didalamnya. Priok sebagai daerah penyangga aktivitas ekonomi pelabuhan, ekologi masyarakat yang ada didalamnya beragam. Namun demikian inklusivitas dan ikatan sosial antar warga kuat. Terlebih dalam banyak kesempatan mereka berinteraksi satu sama lain.

"Kita bersyukur bahwa Menkum HAM sudah menyampaikan permohonan maaf, meski terlambat saya berharap bahwa ini menjadi momentum bagi semua pejabat publik untuk tekun serta serius dalam menerapkan nilai-nilai etika" ujar Mantan Wakapolri ini.

Sebagai Informasi pernyataan Yasonna menjadi persoalan saat ucapan Yasonna dalam acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS)' di Lapas Narkotika



Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu.

Dalam sambutannya membandingkan antara kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Menteng Jakarta

Pusat. Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin. Sedangkan hal sebaliknya terjadi di kawasan pemukiman Menteng.

Kejagung Harus Follow *The Money* Kasus Jiwasraya

Merunut siapa saja yang menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus jiwasraya ? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka ?",

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (21/01) — Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, salah satu agendanya membahas mengenai persoalan kasus Jiwasraya, Senin, (20/01/2020)

Anggota DPR RI Aboebakar Alhabsy menyampaikan bahwa kasus Jiwasraya merupakan pekerjaan berat untuk Jampidsus dan Jaksa Agung. Namun demikian perkara ini tentunya harus dihadapi, apalagi menyangkut nama bangsa dan negara.

"Nasabah Jiwasraya bukan cuman WNI, namun 437 warga negara Korsel yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar atau lebih dari setengah trilyun. Karenanya, ini

menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia," tegas pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe mengapresiasi kerja cepat dari kejaksaan yang mencekak 13 orang keluar negeri terkait kasus ini, dan ada 5 orang yang sudah di tahan.

"Ini seperti menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini," ungkapnya.

Dalam penanganan kasus korupsi, kata Habib Aboe, biasanya dilakukan dua pola, yaitu "follow the money" dan "tracking the decicion maker".

"Merunut siapa saja yang

menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus jiwasraya ? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka ?", tanya pria berkacamata ini.

Kemudian tak kalah pentingnya, menurut Habib Aboe, yakni melakukan "follow the money" hal ini diperlukan untuk mengetahui kemana saja uang itu mengalir.

"Kekantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlubuh. Apakah hal ini sudah dilakukan ? kemana saja aliran dana jiwasraya?", Habib Aboe bertanya.

Hal lain yang paling penting untuk kejaksaan, ungkap Habib Aboe, bukan sekedar menahan atau mepidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran untuk bangsa ini.

"Lebih penting lagi, kejaksaan agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset aset para tersangka ini perlu di sita", tegasnya.



Tentunya, kata pria yang juga sebagai Ketua MKD ini, penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus.

"siapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan assetnya, siapa saja para pengambil

kebijakan yang terkait kasus ini, juga langsung bekukan assetnya, atau langsung lakukan penyitaan. Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan," pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Diminta Penuhi Laut Natuna dengan Kapal Dalam Negeri

Banyak kapal nelayan asing berani nekat masuk ke perairan Natuna bahkan ada yang dikawal oleh kapal penjaga pantai negaranya, menunjukkan bahwa ikan di Natuna banyak dan bernilai tinggi. Ikan-ikan ini seharusnya ditangkap oleh kapal-kapal ikan kita, bukan oleh mereka

Dr. Hermanto, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Pemerintah Diminta Penuhi Laut Natuna dengan Kapal Dalam Negeri

Banyak kapal nelayan asing berani nekat masuk ke perairan Natuna bahkan ada yang dikawal oleh kapal penjaga pantai negaranya, menunjukkan bahwa ikan di Natuna banyak dan bernilai tinggi. Ikan-ikan ini seharusnya ditangkap oleh kapal-kapal ikan kita, bukan oleh mereka

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (24/01) -- Anggota Komisi 4 DPR Hermanto, mendesak Pemerintah agar segera memenuhi ruang Laut Natuna dan zona ekonomi eksklusifnya dengan nelayan dan kapal perikanan Indonesia.

Hal ini agar ikan dan potensi laut lainnya hanya dikelola bangsa Indonesia, tidak menjadi bulan-bulanan kapal nelayan asing seperti yang sudah-sudah.

"Banyak kapal nelayan asing berani nekat masuk ke perairan Natuna bahkan ada yang dikawal oleh kapal

penjaga pantai negaranya, menunjukkan bahwa ikan di Natuna banyak dan bernilai tinggi. Ikan-ikan ini seharusnya ditangkap oleh kapal-kapal ikan kita, bukan oleh mereka," papar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada insan pers.

Dilaporkan, Laut Natuna termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI 711 memiliki potensi tangkapan mencapai 1,003 juta ton per tahun.

Khusus untuk Laut Natuna, menurut studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2011, potensi sumber daya ikan yang tersimpan di dalamnya adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari potensi WPP 711.

Disamping optimalisasi tangkapan ikan, lanjut Hermanto, pemenuhan ruang laut Natuna oleh kapal ikan Indonesia sekaligus juga sebagai upaya menjaga kedaulatan NKRI.

Keberadaan kapal perikanan Indonesia setidaknya bisa menimbulkan rasa enggan kapal nelayan asing untuk masuk ke perairan Indonesia.

"Adapun kapal asing yang nekat masuk ke perairan Indonesia akan segera diketahui oleh awak perikanan kita, untuk selanjutnya dilaporkan ke aparat keamanan guna ditangkap atau dihalau keluar", papar legislator dari PKS ini.

Pemenuhan ruang laut oleh kapal perikanan dalam



negeri ini, lanjutnya, tentu saja dengan mempertimbangkan aspek konservasi.

"Saya yakin pemerintah sudah punya angka penangkapan maksimal dengan mempertimbangkan kelestarian ikan di Laut Natuna", ucapnya.

Menurut Hermanto, pemenuhan ruang Laut Natuna oleh kapal perikanan, dalam negeri berpatokan pada angka penangkapan maksimal tersebut.

Foto dpr.go.id

Hermanto Pimpin Komisi IV Terima Kunjungan DPRD Tanah Datar

Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 sebesar Rp. 21,05 triliun. Tetapi memang dibagi ke seluruh Indonesia. Tapi Dengan kehadiran Tanah Datar menyampaikan aspirasi disini, semoga Komisi 4 kompak mendorong anggaran yang lebih besar dari biasanya kesana

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (24/01) — Hermanto memimpin Komisi 4 DPR RI menerima kunjungan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (23/1). Para wakil rakyat Tanah Datar tersebut menyampaikan aspirasi seputar pembangunan pertanian di daerahnya.

Ketua Komisi II DPRD Tanah Datar Dedi Irawan mengungkapkan, Tanah Datar merupakan pusat budaya Minang. Memiliki luas 1336 km2.

"Tujuh puluh persen wilayah kami adalah kawasan

pertanian dan 70% penduduk juga bergantung pada pertanian", ungkapnya.

Semua hal tersebut, sudah disampaikan ke Kementerian Pertanian tetapi kurang dapat tanggapan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hermanto menyebutkan bahwa pembangunan pertanian berbasis teknologi modern sudah diprogramkan secara berkelanjutan dalam anggaran Kementerian Pertanian.

"Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 sebesar

Rp. 21,05 triliun. Tetapi memang dibagi ke seluruh Indonesia," ungkapnya.

Hermanto menambahkan pihaknya akan menyampaikan secara langsung apa saja yang menjadi masukan atau input untuk pembangunan masyarakat di daerah.

"Tapi dengan kehadiran Tanah Datar menyampaikan aspirasi disini, semoga Komisi 4 kompak mendorong anggaran yang lebih besar dari biasanya kesana", ucap legislator dari Sumatera Barat 1 ini.



Temuan Impor Sampah di Tanjung Priok

Fraksi PKS Minta Izin Impor Ditutup

(Impor sampah) ini mengusik rasa nasionalisme saya. Sebab, hanya negara sampah yang mau dijadikan tempat pembuangan sampah. Impor sampah berbahaya bagi lingkungan dan mencemari rantai makanan. Oleh sebab itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah bertindak tegas pada perusahaan pengimpor sampah

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (23/01) — Temuan 1078 kontainer sampah impor yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, mendapat respon anggota komisi IV DPR RI, saat melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (23/01/2020).

"Ini tindakan tidak masuk akal. Segera tutup kebijakan impor sampah," tegas anggota komisi IV dari FPKS, Slamet kepada media.

Menurutnya, impor sampah telah mengusik rasa nasionalisme dirinya. Sebab,

kata dia, hanya negara sampah yang mau dijadikan tempat pembuangan sampah.

"Impor sampah berbahaya bagi lingkungan dan mencemari rantai makanan. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah bertindak tegas pada perusahaan pengimpor sampah", tegas Slamet.

Dengan tegas Slamet meminta Pemerintah untuk mencajut izin impor sampah, jika perusahaan bandel terus menerus mengimpor sampahnya.

"Kami meminta

Pemerintah untuk melakukan re-ekspor secepatnya ke negara asal sampah atau sumber plastik," tandasnya.

Jika negara asal sampah tidak mau menerima, lanjut dia, maka dapat dilaporkan ke sekretariat Konvensi Basel.

"Fraksi PKS akan paling pertama menolak impor sampah/ limbah dalam bentuk apapun masuk ke wilayah NKRI," pungkasnya.

Hal tersebut, lanjut dia, karena Permendag 31 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-undang 18 tahun 2008.

"Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk membuat komitmen dengan negara Pengekspor limbah plastik agar bersama mencegah masuknya limbah plastik ke Indonesia," tuturnya.

Menurut Slamet, Diizinkannya impor sampah salah satu wujud ketidakpedulian negara pada warganya.

"Pelaku usaha 'rongsok' hari ini mengeluh. pasalnya, harga barang rongsokan saat ini tidak stabil karena efek impor sampah tersebut", tutup Slamet.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Meningkatnya Kecelakaan terhadap Truk **DPR Dukung Kebijakan Baru Kemenhub**

Saya minta pada Menhub untuk tidak mundur dan tetap menerapkan kebijakan Zero ODOL meski ada permintaan penanggulangan. Alasannya sudah jelas, selain menyebabkan kerusakan jalan, angkutan ODOL ini menjadi penyebab terbesar kecelakaan diberbagai daerah

Ir. H. Sigit Sosiantomo
Anggota Komisi V DPR RI

Foto : dpr.go.id

Meningkatnya Kecelakaan terhadap Truk, DPR Dukung Kebijakan Baru Kemenhub

Saya minta pada Menhub untuk tidak mundur dan tetap menerapkan kebijakan Zero ODOL meski ada permintaan penanggulangan. Alasannya sudah jelas, selain menyebabkan kerusakan jalan, angkutan ODOL ini menjadi penyebab terbesar kecelakaan diberbagai daerah

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (25/01) --- Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendukung langkah Kemenhub menerapkan Zero Truk Over Dimension and Over load (ODOL) pada 2021, mengingat meningkatnya angka kecelakaan ditahun 2019 yang disebabkan oleh truk ODOL.

"Korlantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sepanjang 2019 mencapai 116.395 kasus, naik hampir 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 109.215 kasus. Dan peningkatan angka kecelakaan ini salah satunya

disebabkan oleh angkutan truk (ODOL) di berbagai daerah. Karenanya, kami mendukung kebijakan Zero ODOL yang ditetapkan Kemenhub dan harus direalisasikan," kata Sigit, anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Selain menjadi penyebab meningkatnya angka kecelakaan, angkutan ODOL juga menyebabkan kerusakan jalan, perlambatan kecepatan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan kerugian

kerusakan jalan akibat kondisi over dimensi dan over loading truk-truk adalah sebesar Rp43 Triliun per tahun.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kata Sigit, pelanggaran ODOL termasuk kejahatan dan bisa dipidanakan.

UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 227 dengan tegas melarang memodifikasi atau merubah kendaraan yang menyalahi rancang bangun dan uji tipenya (SRUT). Hal ini jelas menyalahi hak cipta sekaligus merugikan negara karena tak membayar PNPB. Dan pada akhirnya tak laik jalan sehingga bisa membayakan keselamatan serta merusak jalan.

"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang



diperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)." Kata Sigit.

Untuk itu, Sigit, meminta Kemenhub untuk tidak mundur memberlakukan Zero ODOL di 2021 meski ada permintaan dari Kementerian Perindustrian agar pelarangan ODOL tidak diberlakukan.

"Saya minta pada Menhub untuk tidak mundur dan tetap menerapkan kebijakan Zero ODOL meski ada permintaan penanggulangan. Alasannya sudah jelas, selain menyebabkan kerusakan jalan, angkutan ODOL ini menjadi penyebab terbesar kecelakaan diberbagai daerah. Bagaimana target RUNK menurunkan kecelakaan hingga 50% ditahun 2020 bisa tercapai jika penyebab terbesar kecelakaan masih dibiarkan," kata Sigit.

Foto : dpr.go.id

Bertemu DPRD, Syahrul Terima Aspirasi Pembangunan Provinsi Riau

Ada beberapa yang punya master plan dan ada yang belum. Oleh karena itu saya mengusulkan agar ada pertemuan berkala antara kami di komisi V dengan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar bisa disampaikan secara terintegrasi

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau

Jakarta (24/01) — Komisi V DPR RI menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai.

Mereka menuntut Komisi V memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar pemerintah pusat serius membangun Riau. Devisa diambil, infrastruktur tidak dikelola dengan baik. Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Riau II Syahrul Aidi Maazat usai pertemuan tersebut pada Jumat (24/01/2020).

Syahrul Aidi menerima aspirasi dari DPRD Riau dan DPRD Dumai seputar perhatian pemerintah pusat yang tak

sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Riau ke NKRI selama puluhan tahun ini.

"Aspirasi dari kawan-kawan legislatif dari Riau akan saya perjuangkan di tingkat Komisi V dan DPR RI secara umum. Karena kita pun melihat bahwa pemerintah pusat memang tak serius membangun Riau" terang Syahrul Aidi kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Syahrul Aidi menyatakan Riau telah menyiapkan masterplan pembangunan di Riau. Tinggal pusat memetakan mana daerah prioritas yang harus dibangun.

"Ada beberapa yang punya

master plan dan ada yang belum. Oleh karena itu saya mengusulkan agar ada pertemuan berkala antara kami di komisi V dengan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar bisa disampaikan secara terintegrasi", ungkap Syahrul.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menegaskan saat ini Riau tidak meminta lagi, tapi kita sudah menuntut karena sudah puluhan tahun Riau memberikan perhatian bagi negara dari sektor migas hingga 30% devisa negara.

"Kita saat ini menuntut agar pemerintah pusat memberikan perhatian untuk Riau. Karena Riau saat ini sudah dianak tirikan selama ini. Jauh dari kata cukup pembangunan di Riau oleh pemerintah pusat. Kita sangat iri dengan porsi yang lebih besar yang diterima oleh provinsi tetangga, sementara mereka tidak memberikan sumbangan lebih besar ke negara. Dan wajar bagi kami kita menuntut" ujar Hardianto.



**Focus Group
Discussion (FGD)**



PERSEMBAHAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SKANDAL JIWASRAYA

Ada Apa dengan **BUMN**

29 Januari 2020 | Pk. 13.00 - Selesai
Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI



Facebook Live
Fraksi PKS DPR RI

Keynote Speaker

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Pembicara

Kartika Wirjoatmodjo, S.E., M.B.A.*
Wakil Menteri BUMN RI

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.
Anggota Ombudsman RI

Amin AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS

Dr. Toto Pranoto
Pengamat BUMN

**) dalam konfirmasi*

FPKS: Bebani Wong Cilik, Hentikan Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg

“Mereka wong cilik seharusnya diberi perhatian. Negara harus hadir. Luran BPJS baru saja naik. Jangan beri beban yang kian memberatkan ekonomi rakyat kecil dengan mencabut subsidi elpiji 3 kg

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (20/01) — Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi LPG 3 kg pada pertengahan 2020 ditentang banyak pihak. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saadiah Uluputty ikut buka suara. Menurutnya rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg terlalu dipaksakan.

“Ada apa? Pemerintah tidak memikirkan efek ikutan kepada masyarakat bawah termasuk pedagang kecil yang terdampak langsung atas rencana ini. Kelompok ini menjadi pengguna paling rentan”, sebut Saadiah Uluputty, di Jakarta (Senin, 20/1).

Saadiah meminta agar pemerintah arif serta beri

perhatian sungguh-sungguh.

“Mereka wong cilik seharusnya diberi perhatian. Negara harus hadir. Luran BPJS baru saja naik. Jangan beri beban yang kian memberatkan ekonomi rakyat kecil dengan mencabut subsidi elpiji 3 kg,” tandas Saadiah.

Menurut Kementerian ESDM, opsi pencabutan subsidi diikuti dengan skema uji coba penyaluran elpiji 3 kg atau gas melon secara tertutup. Uji coba ini nantinya melalui mekanisme dana subsidi yang langsung masuk ke rekening penerima subsidi.

Namun skema ini diragukan oleh adeg Fraksi PKS. “Saya ragu. Model distribusi subsidi gas melon secara tertutup butuh data yang valid dan perencanaan matang.

Sampai sekarang masih belum siap”, sebut adeg Dapil Provinsi Maluku ini tegas.

Menurutnya, rencana pencabutan subsidi tidak diikuti oleh akurasi data yang valid dan terverifikasi. “Negara ini punya masalah serius soal validasi data atas warga yang berhak dapat subsidi”, imbu Saadiah.

Sumber data untuk subsidi elpiji 3 kg dari Kementerian ESDM jelas Saadiah, berasal dari Kementerian Sosial, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (DTPPFM) detail Saadiah adalah hasil pemutakhiran oleh BPS dengan survey tahun 2015. Update terpadu berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Namun sayangnya, secara umum berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) SK Mensos No. 8/2019, hasil pemutakhirannya masih jauh dari harapan. “Dari 34 provinsi, hanya 11 provinsi yang melakukan pemutakhiran atau baru mencapai 32,4%”, kata Saadiah.

Di level kabupaten/kota, hanya 71 Kabupaten/kota dari



514 Kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran atau 13,8 %.

“Akibatnya, kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kg akan akan terjadi ketidaktepatan sasaran”, imbuhnya.

Sehingga menurut Saadiah, pemerintah tidak memaksakan diri untuk mencabut subsidi gas elpiji 3 kg pada pertengahan tahun 2020. “Jangan paksakan. Ada banyak hal yang harus dibenahi”,

Saadiah mengingatkan.

Pemutakhiran dan validasi data penerima subsidi, model distribusi, evaluasi efektifitas uji coba distribusi, mengkaji dampaknya bagi masyarakat kecil dan UMKM adalah beberapa catatan yang perlu jadi perhatian.

“Rencana Pencabutan Subsidi elpiji 3 kg akan membebani wong cilik. Hentikan rencana tersebut”, tutupnya.

PKS: Revisi PP Minerba, Jangan Lupakan Hak Rakyat

PKS akan memantau dinamika pengesahan PP Minerba ini. Beleid ini sangat menentukan arah pengelolaan sumberdaya alam kita ke depan. Karena itu jangan sampai peran negara dalam pengelolaan sumberdaya alam berkurang, tergantikan dengan peran swasta,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta, (20/01)— Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah memperhatikan Undang-Undang, dalam merevisi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Minerba.

Menurut Mulyanto jangan sampai Pemerintah didikte dengan kemauan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Isi revisi ke-6 PP Minerba harus berpihak pada kepentingan rakyat.

"PKS akan memantau dinamika pengesahan PP

Minerba ini. Beleid ini sangat menentukan arah pengelolaan sumberdaya alam kita ke depan. Karena itu jangan sampai peran negara dalam pengelolaan sumberdaya alam berkurang, tergantikan dengan peran swasta," ujar Mulyanto.

Mulyanto melihat masih ada waktu bagi Pemerintah untuk melihat ulang isi revisi keenam PP Minerba. Periksa kembali pasal-pasal yang sekiranya merugikan negara. Misalnya tentang tidak ada pembatasan wilayah kerja (WK) pertambangan dan

perpanjangan izin usaha. Pemerintah harus punya peran pengawasan usaha pertambangan ini. Baik secara bisnis maupun lingkungan.

"Pemerintah jangan lupakan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang terjaga. Jangan karena ingin mudah dan cepat Pemerintah lemah dalam hal pengawasan kerja perusahaan (PKP2B)," tegas Mulyanto.

Selain itu Mulyanto menyarankan agar Pemerintah memberi kesempatan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mengelola wilayah kerja pertambangan. Agar keuntungan yang didapat dari usaha pertambangan dapat dinikmati oleh masyarakat. "Keberadaan tambang besar haruslah bermanfaat bagi daerah dimana tambang tersebut ada. Masyarakat jangan hanya menerima akibat dan nestapa kerusakan lingkungan akibat pengelolaan wilayah kerja pertambangan," tandas Mulyanto





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Wacana Teks Khotbah Diatur Kemenag,

Iskan : Khatib Bukan Alat Pemerintah !

Sekarang saya tanya, apakah ada sampai saat ini laporan atau kasus yang masuk tentang khutbah jumat yang mengajarkan radikalisme ? Saya rasa tidak ada. Pemerintah kalau mau mengurangi (radikalisme) itu yah pembinaan saja. Optimalkan peran Bimas Islam dalam menangani hal tersebut,

H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

Terkait Wacana Teks Khotbah Diatur Kemenag

Iskan: Khatib Bukan Alat Pemerintah!

Sekarang saya tanya, apakah ada sampai saat ini laporan atau kasus yang masuk tentang khutbah jumat yang mengajarkan radikalisme? Saya rasa tidak ada.

Pemerintah kalau mau mengurangi (radikalisme) itu yah pembinaan saja. Optimalkan peran Bimas Islam dalam menangani hal tersebut

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menyayangkan wacana yang beredar ditengah-tengah masyarakat saat ini, tentang akan diaturnya teks khotbah Jumat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kakanwil Kemenag Kota Bandung mengatakan wacana soal mengatur teks khotbah Jumat itu dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Agama merujuk hasil studi banding ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

(UAE).

Di sisi lain, Iskan juga mengapresiasi kepada Menteri Agama dengan membantah adanya instruksi tersebut.

"Pak Menteri jangan sampai lakukan blunder lagi, harus ada koordinasi yang jelas dan terukur kepada bawahannya di berbagai daerah." Ujar iskan.

Selain itu, isu atau wacana pengaturan teks khotbah Jumat ini, memang cukup meresahkan dan menjadi perbincangan di masyarakat.

"Saya ingatkan kepada pemerintah, bahwa khatib itu bukanlah alat pemerintah, jadi jangan diatur-atur karena pemerintah juga tidak memiliki wewenang untuk mengatur setiap khatib," tegasnya.

"Sekarang saya tanya, apakah ada sampai saat ini laporan atau kasus yang masuk tentang khutbah jumat yang mengajarkan radikalisme? Saya rasa tidak ada. Pemerintah kalau mau mengurangi (radikalisme) itu yah pembinaan saja. Optimalkan peran Bimas Islam dalam menangani hal tersebut," tutup Iskan.



HNW: Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Jika Cabut Kewajiban Halal

DPR hingga saat ini memang masih menunggu Omnibus Bill RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi diserahkan oleh pemerintah, dan diharapkan agar Omnibus Law RUU Cilaka nanti tidak bermuatan ketentuan yang bertentangan dengan UU JPH, karena akan hanya hadirkan kegaduhan

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (22/01) --- Anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa pihaknya akan menolakan dengan sangat keras Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) apabila benar Omnibus Bill tersebut akan mencabut kewajiban produk halal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa dan draft RUU tersebut yang sudah beredar di masyarakat,

disebutkan adanya ketentuan penutup yang mencabut sejumlah Pasal dalam UU JPH, yakni Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44, mengenai kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta dokumen yang dipersyaratkan" kata HNW, di Jakarta, Selasa, (21/01/2020).

HNW, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI memahami bahwa draft RUU Cilaka yang

beredar di masyarakat memang belum resmi berasal dari pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh main-main dengan menganulir ketentuan perundangan yang berlaku apalagi terkait dengan urusan kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang mayoritasnya Muslim.

"Di AS, Jepang, Thailand yang mayoritasnya non Muslim saja sangat menghormati hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk Halal. Apalagi semua Partai, DPR dan Pemerintah sudah sepakat dengan kewajiban produk halal tersebut, dan menjadikannya sebagai UU JPH. Jadi seharusnya Pemerintah laksanakan lebih baik UU JPH itu, dan jangan malah mau menghilangkan esensinya," tegas HNW.

Menurut HNW, DPR hingga saat ini memang masih menunggu Omnibus Bill RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi diserahkan oleh pemerintah, dan diharapkan agar Omnibus Law RUU Cilaka



nanti tidak bermuatan ketentuan yang bertentangan dengan UU JPH, karena akan hanya hadirkan kegaduhan.

"FPKS akan perjuangkan maksimal aspirasi Rakyat yang menolok RUU yang akan hapuskan kewajiban cantumkan sertifikasi halal tersebut", tuturnya.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan bahwa munculnya kembali isu jaminan produk halal ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjalankan lebih serius amanat dalam UU JPH bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal terhitung 5 (lima) tahun sejak UU JPH tersebut disahkan, yang deadline-nya sudah habis pada Oktober 2019 lalu.

"Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Produk Halal seharusnya segera memenuhi kewajiban dalam UU JPH tersebut," tukasnya.

HNW juga mengatakan bahwa isu yang berkaitan dengan kewajiban produk berlabel halal ini merupakan salah satu dari sejumlah isu yg mendapat perhatian publik, yang perlu terus dikawal bersama.

"Selain mengenai kewajiban produk berlabel halal ini yang perlu kita awasi, ada pula kasus-kasus besar lainnya seperti Kasus Jiwasraya, Kasus Asabri, hingga Kasus dugaan korupsi yang menimpa Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Jangan sampai perhatian masyarakat teralihkan/luput dari kasus-kasus besar tersebut," tutup HNW.



Komisi IX DPR Dukung KSPI Kritisi RUU Cipta Lapangan Kerja

Kita akan bersama buruh. Saya pribadi menolak Omnibus Law ini, walaupun draf belum diberikan, tapi dulu pernah RUU ini pernah direvisi. Walaupun belum muncul, tapi kita tahu arahnya sehingga kita tolak, dan pada waktu itu kita berhasil

H. Ansory Siregar, Lc
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Ansory Siregar usai menerima
aspirasi dari KSPI tentang RUU
Omnibus Law tentang Cipta
Lapangan Kerja di Gedung
Nusantara I DPR RI, Senayan,
Jakarta, Senin (20/1/2020).

Foto : Andri

Sejauh ini belum ada kasus penyebaran virus Corona di Indonesia. Namun, potensi bahaya terus ada sebab Indonesia memiliki perjanjian visa bebas dengan Tiongkok sehingga berpergian di kedua negara cukup mudah

H. Ansory Siregar, Lc

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Jakarta (24/1) Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar meminta pemerintah melakukan langkah yang terukur dan terencana dalam mencegah masuknya wabah corona ke Indonesia.

"Indonesia harus mengantisipasi dan memonitor perkembangan virus tersebut. Sejauh ini belum ada kasus penyebaran virus Corona di Indonesia. Namun, potensi bahaya terus ada sebab Indonesia memiliki perjanjian visa bebas dengan Tiongkok sehingga berpergian di kedua negara cukup mudah." Disampaikan Ansory dalam keterangan pers pada hari Jumat (24/1) di Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini

DPR: Pemerintah Tidak Boleh Lengah, Waspada Gejala Wabah Corona di Indonesia!

menambahan, menurut catatan Indonesia memiliki 2500 mahasiswa di Tiongkok, diantaranya ada 428 mahasiswa dan 40 orang pelajar Indonesia di Wuhan. Apalagi, jika otoritas Tiongkok gagal mengatasi penyebaran virus ini terutama saat dan setelah Imlek. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman dan dalam kondisi yang baik.

"Langkah mitigasi perlu dilakukan oleh seluruh otoritas terkait, penyebarannya kini sudah menjalar ke beberapa negara yang dekat dengan Indonesia. Temuan terbaru di Thailand sudah dua orang dan satu di Singapura". Ulas Anggota Parlemen daerah pemilihan Sumut III ini.

Tercatat kasus gejala penyakit Corona yang terkonfirmasi di Cina terdapat 544 kasus, Thailand 2, sedangkan 1 kasus di Jepang, Korea Selatan, Singapura dan AS. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Luar Negeri perlu melakukan koordinasi intensif dalam mengantisipasi

penyebaran virus ini. Diantaranya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait virus ini secara optimal. Terutama bagi mereka yang hendak bepergian ke daerah-daerah yang terindikasi telah terjadi penyebaran virus corona ini.

"Pihak imigrasi harus antisipatif dengan memperketat masuk keluarnya pengunjung terutama yang berasal dari Tiongkok secara proporsional. Otoritas bandara harus melakukan scanning dengan alat deteksi penyakit. Pun demikian dengan proses karantina hewan-hewan yang diimpor dari Tiongkok." Ujar Ansory.

Wabah CORONA



wabah Corona adalah wabah yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV). Virus ini pertama kali dilaporkan oleh WHO pada tanggal 31 Desember

2019 dan muncul pertama kali di Wuhan, RRT. Virus ini menyebabkan penyakit mirip pneumonia yang dapat menimbulkan kematian bagi para penderitanya. Virus ini berasal dari hewan seperti ular, kelelawar dan hewan peliharaan. Sebagian besar penderita diketahui sempat bepergian ke Wuhan. Saat ini, World Health Organization (WHO) di Geneva akan segera mengadakan pertemuan di minggu ini untuk mendiskusikan apakah virus ini termasuk dalam kategori darurat epidemi atau tidak.



Tak Punya Solusi atas Naiknya Iuran BPJS, Netty Ungkapkan Kekecewaannya

Wajarlah kalau kami semua marah dan kecewa dengan sikap BPJS. Masa sih pemerintah tidak mampu menolong rakyatnya mendapat layanan kesehatan, sementara uang rakyat digunakan ratusan triliun untuk membayar hutang dan bunganya. Ini kan bukti manajemen keuangan negara yang buruk

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (22/01) - Ingkar janji BPJS yang tidak mampu menjalankan kesimpulan rapat dengan komisi IX berupa usulan hak interpelasi dari FKPS. Dampak lainnya, terjadi migrasi 800 ribuan peserta kelas 1 dan 2 ke kelas 3.

"Sikap BPJS kesehatan yang tetap bersikukuh menagih kenaikan iuran pada peserta kelas 3 mandiri menunjukkan tidak adanya political will untuk berpihak pada rakyat.

Pemerintah seakan mati nurani dan hati kecilnya dalam melihat kesengsaraan rakyat," ujar Netty Prasetiyani, sesaat setelah rapat internal Komisi IX, Selasa, 21/01/2020.

Menurutnya, dalam RDP Komisi IX dengan Kemenkes RI, BPJS dan DJSN, Senin (20/01/2020), sebagian besar anggota komisi IX sudah menyatakan keberatan dengan sikap BPJS, bahkan jika belum ada solusi, komisi IX minta agar rapat tidak perlu dilanjutkan.

"Wajarlah kalau kami semua marah dan kecewa dengan sikap BPJS. Masa sih pemerintah tidak mampu menolong rakyatnya mendapat layanan kesehatan, sementara uang rakyat digunakan ratusan triliun untuk membayar hutang dan bunganya. Ini kan bukti manajemen keuangan negara yang buruk," tandas Netty.

Anggota Komisi IX dari Dapil Jabar 8 (Kokab Cirebon dan Indramayu) ini makin geram ketika membaca di media bahwa jika BPJS Kesehatan tetap menjalankan hasil rapat dengan DPR, maka direksi melanggar undang-undang no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Lha, kan, yang dipersalahkan oleh DPR hanya kenaikan kelas 3 PBPu dan BP. Sebab mereka memang tidak mampu. Bahkan banyak temuan di lapangan yang seharusnya mereka malah masuk katagori PBI. Masalah data kan juga masih belum dibereskan oleh BPJS dan Kemenkos. Jadi dimana melanggar aturannya?," tanya Netty.

Lagi pula, kata Netty, alternatif solusi masalah kenaikan iuran untuk kelas 3 mandiri itu adalah usulan dari Kemenkes, bukan DPR.

"Kemenkes menawarkan opsi artinya sudah ada koordinasi dengan BPJS, DJSN dan Kemenkeu. Kenapa BPJS tidak bisa mengikuti saran tersebut. Bukan kah dalam kesimpulan rapat 12 Desember BPJS bahkan menjamin melaksanakannya pada 1



Januari 2020? Bagaimana pola koordinasi di pemerintahan. Saya melihat di internal pemerintah tidak sinkron dalam memberikan jawaban. Kondisi ini menunjukkan adanya gejala patologis yang akut dalam manajemen pemerintahan," pungkas Netty.

Menurut Netty, di tiga lembaga ini ada banyak tenaga ahli hukum yang memahami apakah solusi-solusi itu selaras dengan ketentuan.

"Kenapa diusulkan dan disepakati secara internal oleh pemerintah? Atau jangan-jangan ada unsur kesengajaan pemerintah untuk berlepas

tanggunjawab terhadap kesulitan rakyat?" tandas Netty.

Bahkan setelah membaca UU No 24 tahun 2011, Netty tidak menemukan celah pelanggaran apabila BPJS melaksanakan amanat dari hasil rapat bersama DPR.

"Alasan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan jelas tak berdasar. Tidak ada aturan yang dilanggar baik yang berakibat sanksi administratif maupun pidana. Karena tak ada ketentuan kepentingan dan tidak ada pula subsidi silang antar program," tuturnya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mufida berharap PMI mendapat perlindungan dini dari virus Corona

“Pemerintah harus melakukan tindakan dini terkait virus Corona, sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran sebagaimana amanah Undang-Undang

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (23/01) — Merebaknya penularan Virus Corona di beberapa negara harus segera diantisipasi pemerintah, terutama perlindungan bagi para pahlawan devisa, Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Pemerintah harus melakukan tindakan dini terkait virus Corona, sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran sebagaimana amanah Undang-Undang,” demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayat dalam siaran persnya, Kamis (23/01/2020).

Virus Corona atau yang dikenal dengan 2019-nCoV Virus, diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus ini kemudian menyebar ke beberapa negara. Hingga kini, setidaknya telah merengut nyawa 17 orang.

Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena para ahli telah mengkonfirmasi bahwa virus ini dapat menular antar manusia. Karena itu, semua negara juga telah meningkatkan aktivitas pengawasannya.

Termasuk juga di Hongkong, sebagai salah satu negara yang sangat dekat dengan Cina, dan memiliki aktivitas warga yang sangat banyak, dikhawatirkan akan ikut merasakan dampaknya.

“Jumlah WNI, termasuk pekerja migran Indonesia di Hongkong cukup banyak. Karenanya, Saya menghimbau Konjen RI di Hongkong untuk segera membuka posko dan hotline centre sebagai pusat informasi dan aduan bagi PMI di Hongkong. Jika memungkinkan pro aktif memberikan peringatan kepada semua WNI

disana, khususnya Pekerja Migran Indonesia,” tegas Mufida.

Ditambahkan, pemerintah harus aktif memantau dan memberikan edukasi kepada para PMI. Hal ini sangat penting sebagai perlindungan awal demi mencegah agar jangan tertular virus tersebut.

Mufida juga mengimbau para PMI agar terus berusaha menjaga kebersihan dan higienitas dirinya dan tempat kerja. Sedapat mungkin menghindari kontak yang tidak perlu agar jangan sampai tertular.

“Segeralah menghubungi tenaga medis jika dirasa ada gejala-gejala yang mirip dengan virus ini, sebab sangat berbahaya bagi kesehatan manusia,” pesan Mufida.

Diketahui, di Hongkong terdapat lebih dari 150 ribu WNI mencari nafkah sebagai PMI. Setiap tahunnya selalu ada penambahan jumlah PMI baru memasuki Hongkong dan negara-negara lain.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Omnibus Law harus Berpihak pada Masyarakat, Bukan Investor

isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Omnibus Law harus Berpihak pada Masyarakat, Bukan Investor

isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (22/01) --- Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena

pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

Anggota Komisi X DPR RI ini menyatakan rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya

dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," pungkasnya.

Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

"isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat." tutur Ledia.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi



lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat

ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan diantaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi." tutup Ledia.

Komisi X DPR RI: Pendidikan Non Formal Eksis dan Sangat Bermanfaat

kebijakan yang membuat gaduh tersebut adalah kebijakan yang tidak konsisten karena sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas, Pendidikan NonFormal-Informal (PNFI) merupakan komponen penting dalam pendidikan nasional. Artinya, pendidikan non formal memiliki posisi yang sama dengan pendidikan formal, memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh pendidikan

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Surakarta (23/01) — Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI sangat menyangkan Pepres No. 82/2019 yang membuat gaduh belakangan dan berimbas bagi akses pendidikan yang lebih luas.

“Ke depan akan semakin tidak jelas soal pendidikan non formal ini jika ‘rumah’nya tidak ada, meski menurut Plt Dirjen Vokasi, program dan anggarannya masih ada,” ujarnya saat Kunker Komisi X ke Solo (23/1).

Terbitnya Perpres No. 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud membuat gaduh bagi stakeholder bidang pendidikan non-formal dan masyarakat karena kebijakan tersebut menghilangkan direktorat jenderal yang mengurusi PNFI/Pendidikan Masyarakat.

Dalam kunjungan kerja

tersebut yang juga melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Fikri melihat lembaga-lembaga tersebut sangat eksis dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Faktanya mereka, di Solo ini, eksis dan sangat bermanfaat bagi akomodasi akses pendidikan yang lebih luas,” terang anggota yang pernah berprofesi sebagai pendidik ini.

Sementara itu, besarnya kontribusi pendidikan non formal juga diakui oleh Fx Hadi Rudyatmo, Walikota Surakarta.

Menurutnya, pendidikan non formal telah berkontribusi dalam mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, menyelesaikan masalah pemuda dan masyarakat.

Pihaknya akan membuat ‘rumah’ sendiri bagi pendidikan non formal sesuai kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jika di tingkat pusat tidak ada.

Fikri menambahkan, kebijakan yang membuat gaduh tersebut adalah kebijakan yang tidak konsisten karena



sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas, Pendidikan NonFormal-Informal (PNFI) merupakan komponen penting dalam pendidikan nasional.

“Artinya, pendidikan non formal memiliki posisi yang sama dengan pendidikan formal, memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh pendidikan,” jelas Fikri.

Anggota dari Fraksi PKS ini berharap pendidikan non formal seperti yang dilakukan PKBM ataupun LKP dapat terus memberikan peran dalam mengisi kesenjangan

pengetahuan yang ada di masyarakat. Pasalnya, saat ini tingkat kesenjangan sosial di tanah air, yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan masih amat tinggi.

Menurut Global Wealth Databooks (2016), Indonesia berada di urutan ke empat terbawah setelah Rusia, India, Thailand.

“Bagaimana pendidikan nonformal ini bisa berkontribusi maksimal jika program dan anggaran terus dikurangi, bahkan ‘rumah’nya saja tidak ada?” tutup Fikri.

Kontroversi Perpres 82 Tahun 2019

Perpres 82/2019 itu setidaknya telah menimbulkan kekhawatiran, bahwa Pemerintah Jokowi periode kedua ini akan mengkerdilkan/menyepelekan peran dan kontribusi luar biasa pendidikan yang diselenggarakan masyarakat secara mandiri (informal) yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kelangsungan pendidikan nasional"

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (20/01) -- Anggota DPR RI Fahmy Alaydroes mengatakan bahwa UUD 45 Pasal 31 ayat 1 mengamanahkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Fahmy melanjutkan kemudian UU no 20 menegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Pasal 4).

"Lebih jauh, UU ini juga

mengamanahkan bahwa Pendidikan Informal merupakan subsistem (Jalur) Pendidikan Nasional, sedemikian rupa sehingga dalam UU diposisikan dalam bagian dan pasal tersendiri, yaitu Bagian Keenam (pasal 27: tentang Pendidikan Informal). Pendidikan informal diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hidupnya, baik itu melalui keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pendidikan ini menjadi dasar pembentukan kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan", paparnya.

Peraturan Presiden tentang Kemendikbud yang tertuang dalam Perpres

82/2019, kata Fahmy, menimbulkan kontroversi dan pertanyaan besar, kemana arah pembangunan SDM menuju Indonesia maju yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi?

"Melalui perpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghapus nomenklatur Pendidikan Informal (Pendidikan Masyarakat), yang jelas-jelas merupakan salah satu subsistem dalam Pendidikan Nasional (Pasal 27 UU No. 20/2003)", ungkap Fahmy.

Menurut Fahmy lebih dari sepuluh ribu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam berbagai bentuknya, antara lain pusat-pusat kegiatan belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket Kejar A, B dan C), yang memiliki peserta didik yang telah terdaftar di Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) sebanyak 928.776 orang se-Indonesia per Desember 2018.

"Berbagai macam bentuk kegiatan pendidikan yang secara mandiri dan penuh kesadaran dan kepedulian oleh masyarakat

dan untuk masyarakat (community based education)", tegasnya.

Pendidikan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat ini, lanjut Fahmy dituju untuk anggota komunitas dan berupaya melakukan transformasi kemampuan/kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual, watak dan kepribadian meliputi aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik.

"Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan baik dari usia dini sampai lanjut usia, pria dan wanita, dan semua orang tanpa terkecuali. Yang termasuk dalam bidang kegiatan ini antara lain : (1) Program Pendidikan Anak Usia

Dini, (2) Program Pendidikan Kesetaraan SD (Paket A), SMP (Paket B), SMA (Paket C), (3) Program pendidikan Mental dan Spiritual, (4) Program Pendidikan Keterampilan, (5) Program Pendidikan Vokasional, (6) Program Pendidikan Kewarganegaraan, (7) Program Pendidikan Kerumahainggaan, (8) Program Pendidikan Kewirausahaan, (9) Program Pendidikan Seni dan Budaya, (10) Program Pendidikan Hobi dan Minat, (11) Pendidikan Keaksaraan Fungsional", terang Fahmy.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS: Harga Bahan Pokok Tinggi, Angka Kemiskinan Naik

Pemerintah harus bisa mengantisipasi masalah harga bahan pokok agar tetap stabil, ini penting untuk memberikan ketenangan hidup masyarakat disamping banyak harga kebutuhan lain yang naik

Ir.H.A. Junaidi Auly, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI

PKS: Harga Bahan Pokok Tinggi, Angka Kemiskinan Naik

Pemerintah harus bisa mengantisipasi masalah harga bahan pokok agar tetap stabil, ini penting untuk memberikan ketenangan hidup masyarakat disamping banyak harga kebutuhan lain yang naik

Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (24/01) -- Jumlah penduduk miskin pada September 2019 masih cukup tinggi, mencapai 24,79 juta jiwa. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin hanya turun sekitar 350 ribu jiwa. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan rilis Maret 2019, mencapai 530 ribu jiwa.

Hal yang sama juga terlihat pada jumlah kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan. Jumlah kemiskinan di pedesaan mencapai 14,93 jiwa atau hanya turun 220 ribu. Sementara itu angka kemiskinan di perkotaan mencapai 9,86 juta jiwa atau hanya turun 130 ribu jiwa.

Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly menjelaskan bahwa penurunan persentase angka kemiskinan juga relatif lambat. Secara total, penurunan angka kemiskinan pada September 2019 hanya 0,19 persen dibanding Maret 2019.

"Penurunan persentase angka kemiskinan pada rilis Maret 2019 mencapai 0,25 persen dibandingkan September 2019. Dari sisi pulau, kantong kemiskinan terbesar masih berada di Maluku dan Papua mencapai 20,39 persen; disusul Bali dan Nusa Tenggara sekitar 13,36 persen," kata Junaidi.

Menurut Junaidi upaya

mempercepat penurunan angka kemiskinan, salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga pangan terutama beras.

"Pemerintah harus bisa mengantisipasi masalah harga bahan pokok agar tetap stabil, ini penting untuk memberikan ketenangan hidup masyarakat disamping banyak harga kebutuhan lain yang naik," tandas Bang Jun sapaan akrabnya.

Junaidi melanjutkan, menurut BPS, beras menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di Indonesia.

"Di perkotaan, porsi beras mencapai 20,35 persen terhadap garis kemiskinan sedangkan di pedesaan mencapai 25,82 persen. Komoditas terbesar kedua adalah rokok kretek filter, masing-masing 11,17 persen dan 10,37 persen di perkotaan dan di pedesaan," tutup Junaidi.



Kredibilitas OJK Hilang Gara-Gara Jiwasraya

Rasanya dialog kita dalam beberapa pertemuan itu tidak bisa bapak-bapak manfaatkan sehingga publik dan kita kehilangan trust. Kira-kira pertanyaannya itu kalau selama ini bapak-bapak mengawasi asuransi Jiwasraya dan kerugiannya sampai belasan triliun, bagaimana kami bisa mempercayai pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan yang lain

H. HIDAYATULLAH, S.E.

Anggota Komisi XI DPR RI

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Hidayatullah menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta komisineranya sudah tak punya kredibilitas lagi karena lalai dalam mengawasi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Sebagaimana diketahui Jiwasraya mengalami gagal bayar dan terindikasi merugikan negara sebesar Rp13,7 triliun.

"Dengan terbukanya permasalahan industri keuangan, khususnya di bidang asuransi, sesungguhnya hal ini sudah menghilangkan kredibilitas OJK dan bapak-

bapak sebagai komisioner," ujar Hidayatullah saat Rapat Kerja OJK dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dia menuturkan, rapat kerja semacam ini harusnya bisa dimanfaatkan OJK untuk mengembalikan kredibilitasnya. Namun, nyatanya OJK tak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dalam beberapa pertemuan dengan DPR.

"Rasanya dialeg kita dalam beberapa pertemuan itu tidak bisa bapak-bapak manfaatkan sehingga publik dan kita

kehilangan trust. Kira-kira pertanyaannya itu kalau selama ini bapak-bapak mengawasi asuransi Jiwasraya dan kerugiannya sampai belasan triliun, bagaimana kami bisa mempercayai pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan yang lain," jelasnya.

Menurutnya, mencuatnya kasus gagal bayar Jiwasraya karena selama ini regulator hanya berenang di permukaan, tidak menyelam ke dalam saat melakukan pengawasan industri keuangan.

"Kalau bapak-bapak hanya berenang di permukaan seperti kata Pak Ramon (anggota Komisi XI DPR), kita jadi ragu terhadap pengawasan OJK kepada seluruh industri keuangan. Kan harusnya OJK yang kita andalkan," tukasnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RAPUR

Permasalahan Daerah Kepulauan Penting Dicermati Secara Serius

Permasalahan daerah kepulauan juga menjadi penting untuk dicermati dan dibahas secara serius terkait dengan sederetan realitas yang mencuat. Diantaranya adalah secara sosiologis, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Babel, NTB, NTT, dan Sulut yang terbentang di NKRI mempunyai perbedaan yang spesifik dengan provinsi-provinsi lain

Saadiah Uluputty, S.T
Anggota Komisi VII DPR RI

Foto : dpr.go.id

Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus

Memang ada rasionalitas dan ada kelemahannya. Di sinilah kita harus mencari jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita berharap dalam pembahasan ini kita libatkan para Guru Besar yang melakukan kajian-kajian, khususnya terkait dengan bagaimana pola distribusi keuangan negara ini

H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhulhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam terkait kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang digelontorkan negara kepada Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Pemerintah bisa betul-betul mengambil sikap melanjutkan atau menghentikan dana Otsus.

“Memang ada rasionalitas dan ada kelemahannya. Di sinilah kita harus mencari jalan

keluar terbaik dengan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita berharap dalam pembahasan ini kita libatkan para Guru Besar yang melakukan kajian-kajian, khususnya terkait dengan bagaimana pola distribusi keuangan negara ini,” kata Syaikhulhu usai mendengarkan masukan-masukan dari Profesor dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika Papua tak mendapat dana Otsus, maka akan kesulitan untuk membangun infrastruktur, mensejahterakan masyarakat, menjaga kesehatan masya-

rakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, saat ini pihaknya sedang mencari formulasi dari dana yang bisa disediakan Pemerintah, dari sejumlah kementerian yang bersangkutan. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang infrastruktur.

Syaikhulhu menambahkan, pertemuan ini dalam rangka percepatan pelaksanaan Otsus di masing-masing daerah, sehingga otonomi tidak memunculkan sikap egosentris kedaerahan. “Saya sampaikan kepada Profesor dan Guru Besar, apakah memungkinkan jika sekiranya ada mandatori dari undang-undang bahwa satu daerah itu bisa dilakukan sister provinces dengan daerah lain. Misalnya DKI Jakarta dari sisi keuangan memang punya banyak kemampuan, tetapi wilayahnya kecil. Apakah itu bisa kemudian di-sister-provinces-kan dengan Papua. Sehingga akan ada pemerataan di setiap daerah satu sama lain akan lebih cepat,” jelasnya. (rni/sf)

Foto : dpr.go.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Anggota Fraksi PKS DPR Saadiah Uluputty (kedua kiri) bersama tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Maluku, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Foto : dpr.go.id

Anggota Fraksi PKS Kawal RUU Daerah Kepulauan

"Sejatinya, pendekatan pembangunan juga harus menjawab kekhasan tersebut. Jika distribusi keadilan pembangunan itu ingin diwujudkan, maka harus diimbangi dengan pendekatan prosperity dan security secara bersamaan"

Saadiah Uluputty, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Anggota Fraksi PKS Kawal RUU Daerah Kepulauan

“Sejatinya, pendekatan pembangunan juga harus menjawab kekhasan tersebut. Jika distribusi keadilan pembangunan itu ingin diwujudkan, maka harus diimbangi dengan pendekatan prosperity dan security secara bersamaan”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Jakarta (24/01) - DPR RI menggelar Paripurna Ke-8 pada Rabu (22/01/2020). Paripurna dimaksud untuk menetapkan persetujuan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020.

Dalam rapat paripurna, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saadiah Uluputty, meminta dukungan DPR RI agar RUU Daerah Kepulauan mendapat perhatian memadai.

Saadiah berargumen bawah Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang bercorak Negara Kepulauan, seyogyanya berdampak pada legitimasi yuridis formal pada pengaturan lebih lanjut tentang Daerah Otonom yang berbasis kepulauan.

“Namun sampai saat ini belum diikuti dengan penjabaran Daerah Otonom

yang berbasis kepulauan lebih lanjut di tingkat pemerintahan daerah”, kata Saadiah.

Saadiah menyampaikan bahwa daerah kepulauan memiliki deretan realitas, baik sosiologis maupun yuridis. Pertama, Provinsi Maluku, Maluku Utara dan 5 Provinsi berbasis kepulauan lainnya memiliki karakter kewilayah yang khas. Ada perbedaan spesifik dengan provinsi continental.

“Sejatinya, pendekatan pembangunan juga harus menjawab kekhasan tersebut. Jika distribusi keadilan pembangunan itu ingin diwujudkan, maka harus diimbangi dengan pendekatan prosperity dan security secara bersamaan”, imbuah Aleg Dapil Provinsi Maluku ini.

Kedua kata Saadiah, sejumlah pasal dalam UUD 1945, menjadi hukum positif terutama yang berkaitan dengan prinsip Negara kepulauan belum dijabarkan secara rinci sebagai tuntutan konstitusi atas pendekatan dan perlakuan untuk daerah dengan karakter khasnya.

Penjabaran sebagaimana dalam Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 harus mengakomodir dalam bingkai NKRI.

“Maka, negasinya, baik tersirat maupun tersurat, berkonsekuensi pada pengakuan daerah Kepulauan”, terangnya.

Saadiah melanjutkan, telah dilakukan ratifikasi atas Konvensi Perikeritang Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS) dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

“Dalam UNCLOS 1982 diatur tentang prinsip Negara Kepulauan (archipelagic states) dan perairan negara-negara demikian yang diperjuangkan oleh Indonesia sejak Deklarasi Djuanda 1957”, jelas Saadiah.

Maka, Secara



Anggota Fraksi PKS DPR Saadiah Uluputty (kedua kiri) bersama tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Maluku, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Foto : dpr.go.id

konstitusional telah terkandung prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain memberikan ruang bagi pengembangan daerah-daerah khusus dan istimewa (termasuk mempertimbangkan realitas geografis dan sosial sebagai daerah kepulauan), namun prinsip dimaksud belum dijabarkan secara tegas dan jelas dalam ketentuan UU Pemerintahan Daerah.

“Inisiasi untuk menegaskan perhatian dan pengembangan pembangunan dengan mempertimbangkan realitas geografis, telah digagas lewat usul inisiatif RUU Daerah

Kepulauan”, detail Saadiah.

Ia kembali menyebut jika masyarakat di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara menanti dengan penuh harap, agar RUU Daerah Kepulauan dapat dikawal, dibahas dan ditetapkan nantinya oleh forum paripurna DPR.

“Jika RUU Daerah Kepulauan dapat ditetapkan menjadi Undang – Undang, maka merupakan kado istimewa dari pemerintah dan DPR menjawab aspirasi masyarakat daerah kepulauan”, tutup Saadiah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

*Kunjungi SDN 04
Samudrajaya Bekasi*

***Syaikhu: Jangan
Tunggu Ada Korban
Baru Diperbaiki***

Jangan sampai ada korban baru kemudian diperbaiki. Anak-anak juga tidak nyaman belajar, perbaikan bangunan sekolah ini harus jadi prioritas. Semua pihak terkait diminta untuk menangani masalah ini secepatnya.

H. Ahmad Syaikhu

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

Kunjungi SDN 04 Samudrajaya, Syaikh: Jangan Tunggu Ada Korban Baru Diperbaiki

Jangan sampai ada korban baru kemudian diperbaiki. Anak-anak juga tidak nyaman belajar, perbaikan bangunan sekolah ini harus jadi prioritas. Semua pihak terkait diminta untuk menangani masalah ini secepatnya.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

Bekasi (21/01) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu meninjau langsung SDN 04 Samudrajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang rusak parah, Selasa (21/01/2020).

Politisi PKS itu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera memperbaiki sebelum jatuh korban. Syaikhu mengingatkan ini karena melihat kondisi bangunan yang sudah sangat tidak layak.

"Jangan sampai ada korban baru kemudian diperbaiki. Anak-anak juga tidak

nyaman belajar," ujar Syaikhu yang berasal dari Dapil Jabar VII (Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta).

Syaikhu melanjutkan, perbaikan bangunan sekolah ini harus jadi prioritas. Semua pihak terkait diminta untuk menangani masalah ini secepatnya.

Syaikhu sendiri akan berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Bekasi dan Anggota DPRD nya. Juga dengan Gubernur Jawa Barat dan Anggota DPRD Provinsinya

"Saya akan mengadvokasi

ini dan berkomunikasi dengan semua pihak. Agar segera tuntas," kata Syaikhu.

Seperti diketahui, video kerusakan parah SDN 04 Samudrajaya, Tarumajaya viral di media sosial. Dalam tayangan tersebut, kondisinya terlihat sangat parah. Plafon-plafon banyak yang bolong, lantai banyak yang beralaskan tanah. Kondisi bangunan juga terlihat ringkih.



Bertemu Sandiaga Uno, Nevi Zuairina dan Tokoh Minang Perkuat Silaturahmi

Kehadiran banyak tokoh Minang yang merupakan bagian dari Keluarga Besar Minang Saiyo termasuk Gubernur Sumbang Irwan Prayitono, Fasli Djalal dan pengurus orang Minang di Sydney bertemu Sandiaga Uno di gedung miliknya untuk bersilaturahmi dan memperkuat ikatan persaudaraan.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota DPR RI Dapil Sumbang

Jakarta (22/01) — Gedung Racapital di Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemarin, selasa tanggal 21 Januari 2020, didatangi banyak tokoh Minang untuk bertemu dengan Sandiaga Uno, pengusaha Muda yang pernah menjadi Wakil Gubernur Jakarta.

Menurut Anggota DPR RI Nevi Zuairina, kehadiran banyak tokoh Minang yang merupakan bagian dari Keluarga Besar Minang Saiyo termasuk Gubernur Sumbang Irwan Prayitono, Fasli Djalal dan pengurus orang Minang di Sydney bertemu Sandiaga Uno di gedung miliknya untuk bersilaturahmi dan memperkuat ikatan persaudaraan.

“Tidak bicara politik ya. Kami bertemu Sandiaga Uno di gedung miliknya untuk silaturahmi sekaligus mengajak Sandiaga Uno hadir pada acara Minang Diaspora Network di Sydney,” ujar Nevi Zuairina, Selasa (21/01/2020) di Jakarta.

Menurut Nevi, melihat hadir banyak tokoh dan gubernur, membuktikan sampai hari ini, Sandiaga Uno masih di hati orang Minang.

“Ya setiap berkunjung ke emak-emak di Sumbang, bang Sandiaga Uno selalu dikenang. Sudah menjadi fakta bahwa bang Sandi selalu di hati orang minang loh,” ujar Nevi pada pertemuan itu.

Sandiaga yang bicara cair, serius tapi santai dalam pertemuan itu, menerima dengan senang hati ajakan tokoh Minang untuk dapat hadir pada acara silaturahmi sekaligus pendirian Surau Sydney Australia (SSA) di Sydney.

“Alhamdulillah Sandiaga Uno bersedia hadir di Sydney,” ujar Politisi perempuan PKS Ini.

Bahkan kata Nevi Zuairina, Sandiaga Uno mengapresiasi kompaknya tokoh Minang.

“Tokoh atau orang Minang umumnya meski berbeda pandangan politik, tapi kalau sudah bicara soal orang Minang dan kampung halaman kompak sekali. Ini potensi luar biasa untuk maju dan sejahteranya Sumbang kedepan, itu kata Sandiaga Uno tadi,” ujar Nevi Zuairina.

Kehadiran bersama seluruh tokoh masyarakat Minang se dunia di Sydney nanti, menurut Nevi dilakukan untuk tujuan baik.

“Tujuan utama kami adalah Bersilaturahmi bersama-sama membangun kemaslahatan perantau minang di Sydney khususnya, Australia umumnya,” Tutup Nevi Zuairina.



Sakinah Desak Pemerintah Tak Persulit Warga Dapatkan Hunian Tetap & Jaminan Hidup

karena data simpang siur, mohon dimudahkan cara kerja pemerintah dengan mengambil data yang ada, baik dari ketua forum, ketua kelompok, RT dan RW yang masih ada diselesaikan saja mereka yang masih ada dengan data yang ada dari mereka, arti kata bila bisa dipermudah jangan dipersulit.

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Palu (22/01) — Dalam kunjungan ke Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (Kundapili), Anggota DPR RI Sakinah Aljufri, menyempatkan berdialog dengan korban gempa, tsunami dan liquifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sabtu, (18/01/2020).

Dalam dialog ini para korban mempertanyakan belum tuntasnya bantuan atau jatah hidup untuk mereka sampai saat ini.

Sementara itu menanggapi keluhan warga, Sakinah

berharap pemerintah tidak mempersulit birokrasi warga yang menginginkan huntap dan jadup bagi warga eks liquifaksi Palu, Sigi dan Donggala.

"Persoalan jadup yang kunjung tidak turun karena persoalan data yang tidak valid, itu yang sering disampaikan sehingga tidak pernah tuntas masalah jadub", terang Sakinah.

Untuk itu, Sakinah menambahkan, karena data simpang siur, mohon dimudahkan cara kerja

pemerintah dengan mengambil data yang ada, baik dari ketua forum, ketua kelompok, RT dan RW yang masih ada diselesaikan saja mereka yang masih ada dengan data yang ada dari mereka, arti kata bila bisa dipermudah jangan dipersulit.

"Hal yang terpenting saat ini bagaimana aspirasi masyarakat tersampaikan dan terlaksana. InsyaAllah, apa yang menjadi keluh kesah kita bersama dapat terrealisasi dengan baik," pungkas Sakinah.



Perdagangan Manusia Terjadi di Aceh

Nasir Djamil Minta Polisi Bertindak

“Saya sangat prihatin atas apa yang menimpa Syafridawati dan keluarganya. Melaporkan hal ini kepada kepolisian merupakan keputusan tepat. Kejadian ini telah terjadi berulang kali. Oleh karenanya saya akan mendorong Polda Aceh untuk mengusut secara serius dan tuntas dikarena perdangan manusia merupakan extraordinary crime”

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (20/01) — Anggota Komisi III DPR-RI asal Aceh M. Nasir Djamil merasa prihatin atas terjadinya kembali dugaan praktik perdagangan manusia (Human Trafficking) yang menimpa gadis asal Aceh di Malaysia. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Syafridawati gadis asal Langkahan, Aceh Utara diduga menjadi korban perdagangan manusia atau hilang sejak 2015 di Negeri Jiran, Malaysia.

Hal ini kata Nasir, menambah daftar korban perdangan manusia asal Aceh yang sebelumnya menimpa Syarifah Maulina (24) warga Lameu, Pidie yang dijanjikan

bekerja di Malaysia, dan sebelumnya juga menimpa dua remaja asal Lhokseumawe dengan modus yang serupa pada tahun 2018.

“Empat wanita asal Lhokseumawe juga menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 2015 silam. Kasus-kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Pidie dan Polres Lhokseumawe dengan menangkap sejumlah pelaku”, ungkapnya.

Berdasarkan data dari P2TP2A Aceh kasus perdagangan manusia terjadi setiap tahunnya sejak tahun 2016 dengan kisaran dua kasus.

Terkait kasus yang menimpa Syafridawati, Nasir mengatakan keputusan keluarga untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian sudah tepat. Ia juga akan meminta kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dengan tuntas guna mendapatkan gambaran utuh terkait modus operandi, apakah pelaku merupakan bagian dari kelompok sindikat perdagangan manusia yang selama ini beroperasi di Aceh dan untuk mencari tahu apakah ada korban lainnya.

“Saya sangat prihatin atas apa yang menimpa Syafridawati dan keluarganya. Melaporkan hal ini kepada kepolisian merupakan keputusan tepat. Kejadian ini telah terjadi berulang kali. Oleh karenanya saya akan mendorong Polda Aceh untuk mengusut secara serius dan tuntas dikarena perdangan manusia merupakan extraordinary crime” imbuh Nasir.

Lebih lanjut, Polisi PKS ini akan mencoba berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di Malaysia agar berkoordinasi dengan otoritas setempat guna mendapatkan informasi terkait keberadaan Syafridawati.

“Kita akan mencoba berkomunikasi dengan KBRI di



Malaysia, meminta KBRI untuk mencari tahu keberadaan Syafridawati dan apakah yang bersangkutan masuk dengan legal atau tidak, artinya ia memiliki work pass (izin kerja) atau tidak. Karena yang bersangkutan dijanjikan untuk bekerja dan telah berada di Malaysia sejak 2015.” tambah Nasir.

Nasir Djamil selaku legislator yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan menghimbau kepada masyarakat Aceh khususnya para wanita agar

lebih berhati-hati jika ada tawaran atau luring-iming pekerjaan di luar negeri namun tidak melalui pihak yang terpercaya dan prosedur yang legal.

“saya menghimbau kepada masyarakat Aceh agar tidak mudah percaya begitu saja dengan berbagai macam bentuk tawaran pekerjaan terlebih melalui perorangan dan bukan dari agensi yang terdaftar. Masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang hal itu” tutup Nasir.



DAERAH PEMILIHAN

Kunjungi Huntara Korban Liquefaksi gempa Palu

Palu (21/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, melakukan Kunjer Dapil ke daerah Balaroya di hunian sementara (huntara) korban Liquefaksi gempa Palu, Sabtu (18/1).

"Saya melihat disini banyak anak-anak yang membutuhkan taman baca. Kita bekeinginan harus ada satu taman baca disini. Taman baca seperti perpustakaan kecil itu sangat baik untuk anak-anak dan juga baik untuk ibu-ibu," ungkap Sakinah menanggapi curhatan warga.



BK DPR

Memberi Materi Kajian Muslimah di BK DPR

Senayan (24/01) — Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKS Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si. menyampaikan materi dalam acara Kajian muslimah yang bertema "Menjadi Muslimah agar tidak mudah Baper"

Acara ini dihadiri para pegawai BK DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada Jum'at 24 Januari 2020.



DAERAH PEMILIHAN

Bertemu Sandiaga Uno dan para Tokoh Minang

Jakarta (22/01) — Anggota DPR RI Dapil Sumbar Hj. Nevi Zuairina bersama para tokoh Minang untuk bertemu dengan tokoh dan pengusaha nasional Sandiaga Uno di Gedung Rcapital Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 21 Januari 2020,



KOMISI IV

Hermanto Pimpin Komisi IV Terima DPRD Tanah Datar

Hermanto memimpin Komisi 4 DPR RI menerima kunjungan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (23/1). Para rakyat Tanah Datar tersebut menyam-paikan aspirasi seputar pemba-ngunan pertanian di daerahnya.



KOMISI V

RDPU dengan DPP APPERNAS

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. hadir dalam RDPU Komisi V DPR RI dengan DPP APPERNAS (Aliansi Pengembang Perumahan Nasional) Jaya terkait Paparan tentang Program Kerja Nasional APPERNAS JAYA, Senin, 20 Januari 2020.

Foto dpr.go.id



KOMISI I

Tinjau Palapa Ring

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari, SE. M.Si.Akt melakukan peninjauan ke Palapa Ring di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan infrastruktur yang dilaksanakan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis, 23 Januari 2019. Turut serta dalam rombongan Anggota Komisi I Fraksi PKS H. Sukamta, Ph.D. dan KH Toriq Hidayat, Lc. (Foto : dpr.go.id)



KOMISI IV

Tinjau Program Migran Produktif di NTB

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka peninjauan langsung Program Migran Produktif di NTB, Kamis, 23 Januari 2020. Turut serta dalam rombongan Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar dan Anggota Komisi IX Fraksi PKS Alifuddin dan Netty Prasetyani (Foto : dpr.go.id)

KOMISI X

Kunker Komisi X ke Surakarta

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menyusun analisis tentang eksistensi Pendidikan Non-Formal. Merespon terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82/2019 tentang Kemendikbud yang dinilai banyak kalangan menghapus 'rumah' Pendidikan Non-Formal, Kamis, 23 Januari 2020. Foto dpr.go.id

BALEG

Terima audiensi DPRD Provinsi Maluku

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku Saadiah Uluputty bersama Baleg DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Maluku, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Audiensi ini membahas terkait RUU Daerah Kepulauan. Dengan RUU ini, diharapkan terciptanya perimbangan keuangan antara daerah-daerah Pulau Jawa khususnya, dengan daerah-daerah kepulauan ini konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan



KOMISI XI

Kunker Komisi XI ke RSUD Dr. Rasidin

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati dan Junaidi Auly bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau perkembangan pembangunan RSUD Dr. Rasidin, Padang, Sumatera Barat, Kamis, 23 Januari 2020.

Foto : dpr.go.id



KOMISI X

RDPU Komisi VI bahas Kebijakan Tambang

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Drs. Chairul Anwar Apt. hadir dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan Dr. Ahmad Redi, SH..MH Dosen Universitas Tarumanegara dan Dr. Irine Handika, SH.LLM Dosen Universitas Gadjah Mada dalam rangka mendapatkan masukan terkait isu-isu strategis nasional sektor pertambangan dan masukan terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, Kamis, 23 Januari 2020.
Foto : dpr.go.id



DAPIL

Bertemu Struktur di Kabupaten Serang

Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga dari Dapil Serang Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. melakukan Kegiatan Kunker Perseorangan di Luar Masa Reses dan di Luar Sidang Yang Ke-I di Tahun 2020 bertemu dengan Struktur (DPC/DPRa) dan Aleg PKS (Bpk. Ahmad Faisal) Dapil 1 Kabupaten Serang, serta Bakal Calon Bupati Serang dari PKS (Bpk. Najib Hamas). Resto Walantaka Serang, Pada hari Ahad, 19-01-2020



Aspirasi dari Warga Lampung Tengah

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M menerima kunjungan dari warga Lampung Tengah pada Selasa 21 Januari 2020. Bertempat di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

Foto : Ardian/ Humas FPKS

Kunjungan Serikat Pekerja PT. KAI

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK, MM. menerima kunjungan dari Serikat Pekerja PT. Kereta Api Indonesia (KAI) pada Selasa, 21 Januari 2020. Bertempat di Ruang Rapat pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Kunjungan dalam rang-k a advokasi harmonisasi hubungan serikat pekerja PT. KAI dengan manajemen PT. KAI serta jaminan kepastian pegawai pasca purna karena dana disimpan di PT. Jiwasraya

Foto : Ardian/ Humas FPKS

Kunjungan dari DPRD Padanglawas

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumut H. Iskan Qolba Lubis, MA. menerima kunjungan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padanglawas pada Selasa 21 Januari 2020. Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Kunjungan ini dalam rangka Konsultasi terkait penanganan Bencana.

Foto : Ardian/ Humas FPKS

PROFIL**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., M.Ed**

Pekan ini kita akan berkenalan dengan Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat V Dr. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed. Bapak dengan 4 putera, 2 puteri, 3 menantu, dan 3 cucu ini selalu didampingi oleh isteri beliau bunda drg. Naily Mohammad, MKes. sejak 32 tahun yang silam. Mereka berdua bertemu ketika bersama aktif dalam kegiatan pengajaran di kalangan mahasiswa UI.

Pak Fahmi, - panggilan akrabnya- merupakan pribadi yang periang dan tekun. Menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Indonesia, Depok; S2 Master Manajemen di Universitas Padjajaran Bandung, S2 Master of Education di University of New South Wales di Sidney dan jenjang S3 (doktoral) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Semuanya terkait dengan

bidang yang diminatinya: Psikologi Pendidikan & Manajemen Pendidikan

Sejak mahasiswa sudah terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Awalnya menjadi salah satu pendiri bimbingan belajar di Jakarta, kemudian mendirikan lembaga pendidikan formal jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA. Pak Fahmi adalah salah satu pencetus dan pendiri Sekolah Islam Terpadu pada awal tahun 1990-an, (Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri, di Depok) yang kemudian menjadi trend perkembangan Sekolah Islam Terpadu di seluruh Indonesia hingga kini. Tahun 2013, bersama teman-temannya sesama aktivis pendidikan, kemudian mendirikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia di Yogyakarta. Hingga saat ini Jaringan Sekolah Islam Terpadu sudah beranggotakan 2300 sekolah (TK, SD, SMP, SMA) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pak Fahmi ikut terjun dalam dunia politik praktis, berangkat dari keprihatinan atas apa yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini tergabung di komisi 10 yang membidangi Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Gerakan Pramuka Nasional, Perpustakaan Nasional, Pariwisata & Badan Ekonomi Kreatif.

Alhamdulillah, menjadi anggota DPR menjadi sebuah suratun hidup yang telah dipahami oleh keluarganya

**KELUARGA**

adalah basis Kehidupan



Keluarga adalah basis kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras agar setiap keluarga Indonesia hendaknya menjadi Keluarga yang kuat.

sejak awal, sadar bahwa aktivitas akan semakin padat dan pertemuan semakin jarang. Komunikasi menjadi #koentji dalam menciptakan suasana dan hubungan yang tetap hangat di #KeluargaPKS.

Pesan untuk keluarga Indonesia dari Dr. Fahmy "Keluarga adalah basis kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras agar setiap keluarga Indonesia hendaknya menjadi Keluarga yang kuat. Kuat agama (Bertaqwa kepada Allah SWT), Terdidik, Sehat,

Kemandirian Ekonomi, Memiliki Visi Menjadi Keluarga yang harmoni dan bermanfaat bagi umat"

Bagi sahabat dan #KeluargaPKS yang ingin mengetahui aktivitas Dr. Fahmy Alaydroes, M.M., MEd. dapat mengunjungi aktivitas akun social media :

Facebook :
Dr.H. Fahmy Alaydroes,
MM,MEd.
Twitter : @fahmyalaydroes
Instagram : sahabatfahmy



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI